

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Manajemen

Kata Manajemen berasal dari kata *Manage* yang berarti mengurus, ada juga yang menggunakan istilah tata laksana, tetapi yang paling penting adalah apa makna yang terkandung dalam pengertian tersebut, jadi pada pokok utama pengertian Manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin supaya tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang diinginkan.¹³ Manajemen juga dapat dikatakan suatu proses untuk mengukir sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.¹⁴

Menurut pendapat Luther Gullick yang dikutip dalam buku Suryadi manajemen merupakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis digunakan untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan membuat sistem kerjasama tersebut lebih bermanfaat bagi manusia. Dapat dikatakan sebagai ilmu, karena menggunakan metode ilmiah yang menggabungkan pemikiran rasionalisme dan empirisme (pandangan yang didasari berdasarkan suatu hal yang telah terjadi).¹⁵

¹³ Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, (Yogyakarta : CV. Absolute Media, 2017), hlm. 1

¹⁴ Burhanudin Gesi, *Manajemen dan Eksekutif*, Jurnal Manajemen, Vol.3 No.2, 2019., hlm.52

¹⁵ Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.23

Menurut pendapat Andrew F. Sikula menyatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, motivasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi sehingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut pendapat George R. Terry yang dikutip oleh Usman Effendi menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹⁶

Sejauh ini Manajemen belum mempunyai arti yang dapat diterima secara universal. Mary Parker Foller, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ricky W. Griffin menyatakan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.¹⁷ James A.F Stoner dan Gilbery Jr menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi dan penggunaan

¹⁶ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 3

¹⁷ Rezha Pratama, *Pengantar Manajemen*, (Sleman : CV Budi Utama, 2020), hlm.7

sumber daya organisasi yang lainnya supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada yang memandang manajemen sebagai “*proses*” dan ada pula yang memandang manajemen sebagai “*seni*”. Dari manajemen itu sendiri mengalami perkembangan dari masa ke masa tergantung kebutuhan organisasi, sehingga istilah manajemen yang dikemukakan para ahli sangat beragam. Dan definisi yang dikemukakan para ahli tidak ada yang menjadi patokan dalam pelaksanaan manajerial, akan tetapi seorang manajer harus mampu melaksanakan peran untuk memilih konsep manajemen yang akan menjadi landasan dalam organisasi yang dipimpin.¹⁸ Namun secara umum manajemen mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan organisasi, manajemen itu merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan organisasi yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, pengendalian.¹⁹

Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Dalam implementasinya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu :

- 1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh anggota kelompok agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif - alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk

¹⁸ Afifudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 1

¹⁹ Suhardi dan Anis Eliyana, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.24

mengadakan dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan di masa yang akan datang.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian meliputi : 1) pembagian komponen-komponen kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, 2) pembagian tugas kepada seorang manajer supaya mengadakan pengelompokan tersebut, 3) penetapan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

Fungsi pengorganisasian berhubungan erat dengan sumber daya manusia, sehingga penugasannya dalam unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*.

3) Dorongan (*Actuating*)

Dorongan (*Actuating*) juga disebut sebagai “gerakan aksi” yang mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan unsur perencanaan dan pengorganisasian agar dapat mencapai tujuan-tujuan.

Actuating mencakup penetapan dan pemenuhan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memimpin, memberi penghargaan, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada para pegawai.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian mencakup kelanjutab tugas untuk melihat apakah kegiatan yang ada pada organisasi telah dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan juga dievaluasi agar tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.

5) Pemotivasian (*Motivating*)

Pemotivasian memiliki arti yang lebih condong kepada perasanya yang terdorong dari hati manusia dibandingkan dengan *Actuating*, yaitu sebagai konotasi emosional daripada kata *motivating*. Pemotivasian adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.²⁰

2. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Mengutip pendapat dari E Mulyasa dalam buku Mohammad Rojii pembiayaan adalah suatu sumber keuangan yang dapat menunjang efektifitas dan efisienan dalam pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah salah satu sumber yang sangat berpotensi dalam menentukan kelancaran program kegiatan pendidikan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menajamen pengelolaan pendidikan.²¹

Menurut pendapat Dedi Supriadi dalam bukunya mendefinisikan biaya sebagai seluruh jenis pengeluaran yang berkaitan dengan peyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Pembiayaan merupakan upaya pengelolaan secara ekonomis yang dirancang untuk memperoleh barang atau jasa.²²

Matin menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun yang tidak berupa uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab seluruh pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai

²⁰ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), hlm.17-18

²¹ Mohamad Rojii, Priyo Nurdiyan, An'nur Ridwan P, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*, (Sidoarjo : Umsida Press), hlm.1

²² Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, (Jakarta : Depdiknas, 2001), hlm.3

secara efektif dan efisien yang harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara dan dialokasikan, secara administratif sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien pula.²³

Dari penjelasan beberapa tokoh ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah pengeluaran baik berupa uang atau jasa dalam pendidikan yang digunakan untuk menunjang proses jalannya pendidikan. sumber biaya pendidikan berasal dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan agar dapat diperoleh pendidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Pembiayaan merupakan faktor penting dalam pendidikan yang dialokasikan pada sistem pengelolaan secara administratif untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu baik bagi siswa maupun tenaga kependidikan.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan

Jenis-jenis biaya pendidikan menurut pendapat Anwar dalam buku Pratiwi Bernadetta dibedakan menjadi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*)²⁴ :

a. Biaya langsung (*direct cost*)

Biaya langsung adalah pengeluaran dana secara langsung yang digunakan untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung mengarah pada aspek dan proses pendidikan. Biaya

²³ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8

²⁴ Pratiwi Bernadetta Purba, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 125

pendidikan juga dapat dikatakan sebagai biaya yang secara langsung mengarah pada aspek dan proses pendidikan Biaya rutin (*recurrent cost*). Biaya rutin adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, tenaga sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan sarana prasarana sekolah.

b. Biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung adalah biaya yang pada umumnya tidak secara langsung dapat menunjang proses pendidikan di sekolah. biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis antara lain :

- 1) Biaya pribadi (*private cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan orang tua untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Biaya ini meliputi uang sekolah, ongkos untuk sekolah, dan pengeluaran yang dibayar secara pribadi untuk kebutuhan sekolah.
- 2) Biaya masyarakat (*social cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membiayai keperluan sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perseorangan (termasuk biaya pribadi).

4. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Menurut pendapat Nanang Fattah dalam bukunya menyatakan bahwa sumber dana pendidikan adalah seluruh pihak yang memberikan bantuan dan sumbangan kepada lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi maupun dari masyarakat sendiri. contoh sumber dana atau biaya yang berasal dari

lembaga resmi adalah sumbangan dari pemerintah pusat (APBN) , pemerintah daerah (APBD), kemudian dari wali murid berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan dari masyarakat sekitar.²⁵

Sumber dana atau biaya pendidikan adalah seluruh biaya yang berasal dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

a. Sumber dana pemerintah

Sumber dana dari pemerinrah pusat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai segala rutinitas kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan juga yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Selain itu terdapat bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana yang berasal dari pemerintah daerah berasal dari APBD tingkat kabupaten/kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan untuk kegiatan dan pembangunan lembaga pendidikan. Pemerintah daerah juga memberilan bantuan dana berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS).

b. Sumber dana dari Masyarakat

Sumber dana dari masyarakat berupa sumbangan yang berhubungan baik dari perseorangan maupun dari yayasan atau perusahaan yang ada di dalam maupun luar negeri yang mempunyai perhatian besar terhadap sektor pengembangan bidang pendidikan. Sumber dana ini dapat

²⁵ Nanang fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006),hlm.113

dikatakan sangat efektif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan, khususnya demi kelancaran pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga swasta.²⁶

c. Orang Tua / Wali Murid

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat sumber biaya pendidikan juga diperoleh dari wali murid / orang tua. Pengeluaran yang bersumber dari orang tua biasanya disebut dengan pembayaran infak dan SPP. Pengeluaran keluarga pendidikan dasar banyak berbagai macam jenisnya.

Berikut merupakan jenis-jenis pengeluaran orang tua siswa untuk menunjang kegiatan pendidikan yang dipungut oleh sekolah :

- 1) Uang pangkal
- 2) Biaya sekolah perbulan / SPP
- 3) Biaya kegiatan ekstrakurikuler
- 4) Biaya operasional pembangunan.

5. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Menurut pendapat Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam memperoleh penghasilan atau revenue yang akan digunakan sebagai pengurangan penghasilan. Henry Simamora mengemukakan pendapat bahwa biaya adalah kas atau nilai yang setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan dapat memberi manfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang bagi organisasi.²⁷

²⁶ Nurhayati dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, (Surabaya : Global Aksara Pers), hlm.03

²⁷ Efendi Sianturi, Din Oloan Sihotang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018), hlm. 1

Menurut Depdiknas menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan merupakan tindakan pengurusan atau pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pelaporan.²⁸

Nanang Fatah menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan yang termasuk gaji guru, peningkatan profesionalitas guru, buku pelajaran, alat tulis kantor, pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan pengelolaan pendidikan. Sementara Sudarman mengemukakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing peserta didik, wali murid, masyarakat perorangan, kelompok masyarakat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berlangsungnya kelancaran pendidikan.²⁹

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli yang telah menyusun berbagai teori mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan keuangan dalam bidang pendidikan yang berhubungan dengan strategi memperoleh dan pengalokasian biaya pendidikan.

6. Tujuan dan Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Menurut Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf, tujuan manajemen pembiayaan diantaranya yakni, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meminimalisir penyalahgunaan anggaran sekolah, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.

²⁸ Undang Ruslan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Sleman : CV Budi Utomo, 2021), hlm. 3

²⁹ Makmur Syukri, Indrasyah Sitompul, Oda Kinata Banurea, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Medan : CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm. 2

Tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan menurut pendapat Tjandra, W.R yaitu :

- 1) Meningkatkan penggalan sumber-sumber biaya yang ada di lembaga pendidikan.
- 2) Menciptakan pengendalian yang tepat bagi sumber keungan organisasi pendidikan.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga pendidikan.
- 4) Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keungan lembaga pendidikan.
- 5) Meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana lembaga pendidikan.
- 6) Mengatur berbagai macam dana yang ada dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna menunjang tercapainya tujuan lembaga pendidikan.
- 7) Membangun sistem pengelolaan keungan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang dapat menghindari tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
- 8) Meningkatkan partisipasi *stakeholders* pendidikan.³⁰

Sedangkan tujuan manajemen keuangan dan pendidikan juga dijelaskan oleh Nawawi yang menegaskan fungsi manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi acuan dalam dokumen yaitu :

- 1) Perencanaan keuangan dengan cara membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lain untuk periode tertentu.

³⁰ Undang Ruslan Wahyudin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Sleman : CV Budi Utama, 2021), hlm. 7

- 2) Penganggaran keuangan yang berupa tindak lanjut dari perencanaan keuangan dan membuat detile pengeluaran dan pemasukan.
- 3) Pengelolaan keungan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan yang digunakan untuk meaksimalkan dana yang ada dengan berbagai macam cara.
- 4) Penyimpanan keuangan, mencari sumber dana yang ada untuk pengoprasionalan kegiatan lembaga pendidikan.
- 5) Penyimpanan keuangan berupa mengumpulkan dana lembaga pendidikan kemudian menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
- 6) Pengendalian keuangan berupa evaluasi dan perbaikan atas keuangan dalam sistem keuangan yang ada pada lembaga pendidikan.
- 7) Pemeriksaan keuangan, dengan cara melakukan sudit internal atau keuangan lembaga pendidikan agar tidak terjadi penyimpangan.
- 8) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus sebagai bahan evaluasi.³¹

Dengan adanya aktivitas manajemen keuangan dan pembiayaan diatas maka akan menjadi indikator bagi keberhasilan pada satuan pendidikan dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan pada lembaga pendidikan.

7. Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan

Sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003³² Pengelolaan keuangan pendidikan dilandaskan pada asas keadilan, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab publik. Berikut merupakan pedoman dalam penanganan keuangan dan pembiayaan pendidikan :

³¹ Arwildayanto, Nina Lamatenggo, Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Gorontalo : Widya Padjajaran),hlm.7-8

³² UU No 20 Tahun 2003 SISDIKNAS BAB XIII Pasal 48 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan

a. Transparansi

Transparansi yang ada di lembaga pendidikan menunjukkan bahwa administrasi keuangan lembaga pendidikan sifatnya terbuka, yaitu keterbukaan sumber dan jumlah keuangan, perincian penggunaan, serta akuntabilitas harus transparan sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dengan lebih mudah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) merupakan contoh yang tidak asing bagi seluruh warga sekolah dan orang tua peserta didik.

b. Akuntabilitas

Keadaan seseorang dinilai orang lain berdasarkan kualitas pekerjaannya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan mengacu pada kemampuan untuk bertanggung jawab pada pemakaian biaya sekolah berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan. Terdapat tiga kondisi mendasar yang digunakan untuk membangun akuntabilitas :

- 1) Para anggota peyelenggara lembaga pendidikan terbuka terhadap keuangan lembaga pendidikan.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan standar kerja pada setiap lembaga pendidikan.
- 3) Masyarakat turut berpartisipasi untuk melayani.

c. Efektifitas

Menurut pendapat Garner, memaknai efikasi lebih sulit sebab tidak berhenti hingga tujuan dapat terwujud, melainkan menghasilkan hasil

kualitatif yang dikaitkan dengan visi lembaga pendidikan. Efektif ataupun tidak untuk pengelolaan keuangan bisa dilihat dari apakah semua kegiatan dapat tercukupi dananya dan apakah seluruh rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan.

d. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan jumlah hasil tujuan. Atau perbandingan daya dan hasil. Efisiensi menekankan pada jasa, pemikiran, waktu dan biaya. Efisiensi merupakan keseimbangan antara data masuk dengan data keluar yang biasa disebut dengan input dan output yang berkaitan dengan kuantitas hasil kegiatan.³³

8. Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan pendidikan memiliki kesamaan dengan manajemen pembiayaan, dan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai tiga ruang lingkup yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai tiga fungsi pembiayaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Perencanaan

Pada setiap program memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya program kegiatan tersebut. Perencanaan merupakan salah satu syarat bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa adanya perencanaan atau *planning*, maka pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

³³ Haekal, M Muhsin, Irfan Yusuf, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*, (Bandung : CV Media Sains Indonesia,2022),hlm.28-29

Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan pada awal kegiatan dan selama kegiatan administrasi tersebut berlangsung.

Tahapan yang dilakukan dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menentukan dan merumuskan tujuan yang akan dicapai.
- 2) Melakukan penelitian masalah atau kegiatan yang akan dilakukan
- 3) Mengumpulkan data dan beberapa informasi yang dibutuhkan.
- 4) Menentukan tahapan atau rangkaian tindakan.
- 5) Merumuskan bagaimana masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana masalah kegiatan tersebut dapat terselesaikan.³⁴

Menurut Morphet dalam Undang Ruslan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan adalah :

- 1) Anggaran belanja pendidikan harus dapat mengganti beberapa peraturan yang tidak efektif sesuai dengan peraturan dan prosedur kebutuhan pendidikan pada saat ini.
- 2) Merevisi peraturan dan input lainnya secara relevan, dengan merancang pengembangan sistem pendidikan pada saat ini.
- 3) Memonitor rencana dan menilai kekurangan pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan pada tahap berikutnya.³⁵

³⁴ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.15

³⁵ Undang Ruslan Wahyudin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akhuntabilitas)*, (Sleman : CV Budi Utama, 2021), hlm.33

Perencanaan dalam pembiayaan pendidikan berbasis sekolah setidaknya meliputi dua aktivitas yaitu sistematisasi anggaran dan pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kedua aktivitas tersebut dijabarkan sebagaimana berikut ini:

1) Sistematisasi penyusunan anggaran pendidikan

Anggaran yaitu rancangan operasional yang dibuktikan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang, dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan instansi pada jangka waktu tertentu. Sistematisasi anggaran merupakan penggambaran terhadap aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh instansi pendidikan sehingga dapat diketahui ketentuan biaya pada setiap kegiatannya.³⁶ Anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan, pengontrolan juga sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain anggaran mempunyai masalah atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis sebagai alat penafsir, alat kewenangan dan alat efisiensi. Implementasi ini sesuai dengan pandangan bahwa anggaran biaya berperan sebagai alat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan.

2) Pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Proses pengembangan RKAS pada umumnya melewati tahap-tahap pendekatan prosedur sebagai berikut:

³⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: Balai Pustaka Fakultas Ekonomi, 2009), hlm.167

Pada tingkatan kelompok kerja dibentuk sekolah yang terdiri dari para pembantu kepala sekolah yang mempunyai peran diantaranya melaksanakan identifikasi kepentingan-kepentingan biaya yang harus dikeluarkan setelahnya digolongkan menurut dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilaksanakan, seleksi alokasi yang ditaksir sangat mendesak dan tidak dapat dikurangi, maelainkan ketika rencana tersebut tidak menghambat kelancaran proses pendidikan terlebih proses belajar mengajar, maka bisa dilaksanakan penyusunan biaya selaras dengan dana yang ada.³⁷

b. Pelaksanaan

Sondang P Siagian menyatakan bahwa pelaksanaan yakni usaha dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan atau telah ditetapkan melalui penciptaan iklim, budaya, dan kerja sama yang produktif. Pelaksanaan juga berarti mengarahkan, memberi dorongan, dan memerintah. Dengan demikian pelaksanaan dalam manajemen pembiayaan pendidikan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien.³⁸

Secara umum dalam pendidikan, sistem pembiayaan atau keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua aktivitas yaitu pendapatan (*income*) dan pengeluaran atau pemakaian (*output*).

1) Pendapatan

³⁷Dinas Pendidikan, *Pedoman Manajemen*, (Bandung: Direktorat Kelembagaan Agama Sekolah, 2003) hlm. 116

³⁸ Sherly, Leni Nurhayati, Hery Yanto, dkk, *Manajemen Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktis*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2020), hlm. 132

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah.

Pendapatan sekolah terutama dalam hal keuangan berasal dari berbagai sumber-sumber dana. Hal ini tentunya perlu adanya pembukuan yang jelas dan tentunya sesuai berdasarkan kebijakan manajemen yang serasi dengan keputusan yang telah di setujui secara konsep maupun dari pemerintah. Pada teorinya manajemen dalam penerimaan dana terdapat beberapa pendekatan dalam pengaplikasiannya, namun dalam pengelolaan pendidikan pada sekolah terdapat beberapa ciri-ciri yang identik.³⁹

Kebijakan dalam pembukuan penerimaan dana sekolah pada lingkungan divisi pusat nampaknya memagut panduan antara peraturan pemerintah pusat dan sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah memiliki kewenangan terhadap anggaran yang masuk namun tidak semua anggaran yang ada dapat dikelola menurut kebijakan sekolah dikarenakan terdapat kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan petunjuk teknis mengenai penggunaan atau pemakaiannya yang harus

³⁹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2020),hlm.45

dipatuhi oleh sekolah sehingga sekolah tidak boleh menyelewengkan dana tersebut. Terlebih Sekolah merupakan penggerak atau pengelola dalam tingkatan makro sehingga pengelolaan keuangan hanya sebatas pengelolaan dana pada tingkatan operasional.

Pendapatan biaya pendidikan diperoleh dari sumber pembiayaan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah, peningkatan mutu layanan pendidikan sulit dicapai. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mencari sumber biaya pendidikan adalah mengerahkan sumber dari masyarakat, seperti tenaga, bahan bangunan, dana yang mungkin belum banyak dimanfaatkan. Oleh sebab itu, masyarakat juga harus menyadari jika pembayaran dana yang bersumber dari masyarakat sangat membantu keuangan sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan.⁴⁰

2) Pengeluaran

Kegiatan pengeluaran biaya pendidikan tentunya tidak menyimpang dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Pengeluaran biaya pendidikan dipergunakan secara efektif dan efisien, yang dimaksud yakni penerimaan/pendapatan dana. Untuk pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan. Upaya mencukupi kebutuhan sekolah mengutamakan kebutuhan penting dengan menyusun skala

⁴⁰ Nasir Usman, Muniarti. *Pengantar Manajemen Pendidikan*, (Jakarta : Animage,2010),hlm.58

prioritas. Seleksi alokasi dipilih dari keperluan yang begitu mendesak dan tidak dapat dikurangi.⁴¹

Pengeluaran merupakan bentuk dari penghabisan biaya yang berkaitan dengan sesuatu atau apapun yang berhubungan dengan kebutuhan awal sampai dengan akhir proses pembelajaran di sekolah. Contoh dari kebutuhan awal seperti bahan ajar, peralatan ataupun fasilitas, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Pada ilmu manajemen perihal keuangan sekolah, pembukuan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan tetap memperhatikan peraturan yang ada. Maka dari itu pemasukan maupun pengeluaran yang ada harus selalu ada pembukuan yang tertulis sehingga dapat memudahkan bagi siapapun dan meminimalisir terjadinya pengeluaran yang menyeleweng.

Dalam melakukan pembukuan ini, terdapat pertanggungjawaban pembukuan yang dalam penyusunannya memiliki sejumlah hal yang wajib dijadikan landasan oleh bendahara seperti buku tabelariss, format buku kas harian dan laporan daya tampung pemakaian anggaran dan juga beban pajak. Dan tidak lupa untuk mencatat pengeluaran sesuai dengan kegunaan serta waktu kejadian.⁴²

Kepala sekolah merupakan pelaksana yang paling memiliki andil yang cukup besar untuk memaksimalkan dalam membuat rencana keuangan sekolah, disini kepala sekolah mempunyai peran

⁴¹ Mochammad Idhoci Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2004), hlm.144

⁴² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Banten : Univerisitas Terbuka,2021).hlm.211

dalam hal mengembangkan beberapa aspek Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi penyusunan administrasi.

Berlandaskan sudut pandang tersebut perencanaan keuangan sekolah harus bisa memberikan celah bagi peningkatan serta pemahaman teori maupun konsep mengenai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pada manajemen keuangan sekolah, selain sebagai penanggung jawab perencanaan keuangan sekolah kepala sekolah juga memiliki peran dalam menyusun anggaran belanja sekolah dan dibantu oleh delegasi yang telah diputuskan oleh kebijakan sekolah dan komite sekolah di bawah pemantauan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam proses pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilaksanakan sesuai prinsip manajemen pembiayaan, yakni transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Dalam hal perealisasi anggaran, dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan lembaga pendidikan. Khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Maka setiap perolehan dana, pengeluarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).⁴³

c. Evaluasi

⁴³ Ibid.,135

Pelaksanaan evaluasi terhadap penggunaan biaya pendidikan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Evaluasi dilaksanakan supaya pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Program lembaga pendidikan berkaitan dengan jumlah dana yang tersedia di lembaga pendidikan. Program kerja dan pembiayaannya harus sinkron sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Oleh sebab itu di dalam evaluasi pembiayaan kegiatan ini, kepala sekolah harus melihat dengan teliti dan mensinkronkan antara pelaksanaan kegiatan dengan biaya yang telah dikeluarkan, dan juga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.⁴⁴

Adapun tujuan dari sinkronisasi dana pendidikan adalah pertanggung jawaban untuk mengendalikan aktivitas program dan kegiatan maupun biaya yang dialokasikan oleh sekolah. dalam artian tujuan dari sinkronisasi atau penyalarsan dana pendidikan berfungsi untuk mengendalikan biaya dengan tahapan pengelompokan, pencatatan, dan menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh kepala sekolah atas biaya yang telah dikeluarkan atas tanggungjawabnya.⁴⁵

Dari tahap evaluasi, kemudian terdapat tahapan auditing. Auditing adalah seluruh kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban

⁴⁴ Bedjo Sujanto, *Pengelolaan Sekolah : Permasalahan dan Solusi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 71

⁴⁵ Nining Asniar Ridzal, Amelia Rizky Alamanda, Shella Budiawa, *Akuntansi Keprilakuan Kontemporer Berbagai Bidang*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 26

penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran dan penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak yang berwenang.

Evaluasi merupakan dimana anggaran harus dapat meladeni dengan baik dalam rangka meningkatkan efektifitas sekolah. Evaluasi sering menunjukkan probabilitas adanya kesenjangan di dalam tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia. Pengawasan keuangan sekolah harus dilaksanakan melalui aliran masuk dan keluar uang yang diperlukan bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang Oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan ditangani sebagai berita acara, dan kepala sekolah bertanggung jawab.

Seluruh kegiatan evaluasi anggaran ditulis dalam sebuah laporan keuangan. laporan keuangan penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari sistem pengawasan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi, dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan. Pelaporan penggunaan anggaran pendidikan merupakan bagian dari sistem pengawasan yang memuat hasil-hasil pelaksanaan rencana dan program pendidikan, masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi, dan alternatif-alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan.⁴⁶

⁴⁶ M. Haekal, Mukhsin KS, Irfan Yusuf, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam*, (Bandung : Media Sains Indonesia), hlm. 189

Kegiatan lain yang merupakan bagian dari evaluasi pembiayaan adalah pengawasan. Pengawasan adalah suatu kegiatan melihat, memerhatikan, memonitor memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada dalam perencanaan.⁴⁷

B. Mutu Layanan Pendidikan

1. Pengertian Mutu layanan

Mutu layanan merupakan kualitas dari sebuah pelayanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan para pengguna jasa atau barang. Permasalahan mutu layanan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola lembaga pendidikan. Pada dasarnya kualitas dan mutu merupakan dua kata yang menggambarkan kondisi yang terbaik dari suatu hal.

Menurut pendapat Joseph & Berk dalam buku yang ditulis oleh Murniati A.R, dkk mendefinisikan mutu sebagai : 1. Landasan terpenuhinya harapan dan persyaratan sebuah produk. 2. Mutu merupakan karakteristik yang dapat diukur baik dari segi kuantitas maupun wujud yang akan disajikan. Sedangkan menurut pendapat Goetsh & Davis menyatakan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, layanan, personel, proses, dan lingkungan yang telah memenuhi harapan.⁴⁸

Sesuai dengan pandangan Fattah & Ali dalam buku Murniati mutu pendidikan memiliki ciri khas yang unik, karena pendidikan bukan bagian dari

⁴⁷ Ibid.,201

⁴⁸ Murniati A.R, dkk, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Kejuruan, (Sleman : CV Budi Utama, 2021),hlm. 132

dunia industri yang menyediakan produk atau dalam bentuk benda, tetapi produk pendidikan lebih berupa dalam pelayanan. Layanan tersebut yang akan diberikan kepada pengguna jasa pendidikan. Ciri-ciri dari mutu layanan pendidikan dapat dikatakan sebagai berikut⁴⁹ :

- a. Mutu pelayanan pendidikan harus memiliki rasa kepercayaan (*reliability*) yang tinggi terutama kepercayaan yang berkaitan dengan waktu.
- b. Menjamin bahwa pelayanan pendidikan dapat memberikan jaminan kualitas bagi para pengguna jasa.
- c. Pelayanan pendidikan harus memadai yang diperuntukkan bagi peserta didik.
- d. Mutu layanan pendidikan harus bersifat responsif terhadap pelayanan yang dibutuhkan peserta didik.
- e. Memberikan kemudahan pada akses pelayanan pendidikan.

Pendidikan yang bermutu merupakan harapan bagi seluruh masyarakat di suatu negara, hal ini berkaitan dengan pengalaman yang menunjukkan bahwa modal dalam menghadapi perkembangan zaman adalah pendidikan. Karena pendidikan dapat mengupayakan kebutuhan dan harapan-harapan bagi peserta didik. pendidikan sebagai sebuah investasi, pendidikan juga sebagai kegiatan dinamis dan penuh tantangan yang menyangkut kepentingan semua orang. Oleh sebab itu, pemberian layanan pendidikan yang bermutu merupakan hal yang harus diberikan bagi pengguna jasa pendidikan.⁵⁰

Dari uraian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa layanan pendidikan mempunyai peran penting bagi lembaga pendidikan

⁴⁹ Ibid.,134-135

⁵⁰ Nasir Usman dan Murniati A.R, *Pegantar Manajemen Pendidikan*, (Tangerang : AnImage, 2019),hlm.202

sebagai penyelenggara layanan agar dapat bersaing di era global pada saat ini. Tuntutan yang diharapkan dari pengguna jasa pendidikan adalah kualitasnya dapat terjamin dengan baik dari segi akademis maupun administratif.

2. Konsep Dasar Mutu Layanan Pendidikan

Terpenuhinya mutu produk atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan mendatangkan suatu kepuasan. Dikarenakan pentingnya jaminan mutu produk atau jasa, maka suatu lembaga perlu mengenali apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen.

Dalam bidang pendidikan juga perlu melakukan pengenalan terhadap kebutuhan konsumen. Hal ini dilakukan supaya menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Menurut pendapat Gronross yang dikutip dalam buku tulisan Agung Nugroho, dkk mendefinisikan pelayanan adalah serangkaian aktifitas yang tidak kasat mata yang terjadi karena adanya interaksi antara konsumen dan lembaga pemberi layanan yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan konsumen.

Dalam lembaga pendidikan, yang dimaksud sebagai konsumen adalah pihak-pihak yang ada pada sistem penyelenggara pendidikan maupun diluar itu. Menurut Ibrahim dan Rusdiana yang dikutip dalam buku tulisan Nasir Usman dan Muniati, konsumen atau pelanggan dalam yakni pelanggan internal yang berada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan seperti tenaga pendidik, dan karyawan sekolah.⁵¹

⁵¹ Agung Nugroho Catur Saputro, dkk, *Manajemen Mutu Terpadu untuk Pendidikan*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm.107-108

C. Peran Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Standar nasional pendidikan dijadikan sekolah untuk menentukan kegiatan dan perbaikan-perbaikan program untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah, diperlukan kerja sama oleh semua warga sekolah dan pihak luar yang ada kaitannya dengan dengan madrasah seperti orang tua, pemerintah, yayasan, dll. Kerja sama tersebut harus dipupuk dan ditekuni untuk mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai aspek tersebut dapat dipandang sebagai layanan manajemen pendidikan yang diberikan oleh madrasah. Oleh sebab itu biaya pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai aspek yang telah direncanakan oleh madrasah.

Menurut Nanang Fattah dalam Syukri Sitompul pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik seperti pengadaan sarana prasarana pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.⁵²

Suryosurobroto menyatakan dalam kutipan buku Teguh Triwiyanto bahwa layanan pendidikan merupakan sistem, berusaha melihat bagian-bagian sistem tersebut serta interaksi satu sama lain. Bagian-bagian itu sering disebut dengan aspek atau komponen. Melalui peninjauan diharapkan dapat ditemukan

⁵² M. Syukri Sitompul, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Medan : C.V Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm.31

permasalahan-permasalahannya sehingga dapat menetapkan apa yang sebaiknya dilaksanakan untuk memperbaiki aspek itu kemudian mengembangkannya.⁵³

Sedangkan pendapat Nurhayati menyatakan bahwa dengan dukungan finansial yang cukup dan terpenuhi akan mempermudah proses manajerial suatu lembaga pendidikan untuk melakukan kegiatan dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dinaungi. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya aktivitas-aktivitas belajar mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Biaya pendidikan juga memiliki keterkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk ikut andil dan merasa memiliki lembaga tersebut, oleh karena itu jika sekolah ingin mendapatkan dana dari masyarakat maka lembaga tersebut harus memberikan kualitas layanan yang baik. Dan dari kepercayaan tersebut akan membangun kesadaran masyarakat untuk memberikan dana bantuan pada sekolah. Biaya pendidikan diharapkan memberikan layanan yang berkualitas bagi penggunanya dan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang memadai sesuai dengan yang telah diharapkan.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan merupakan suatu proses dalam mengoptimalkan dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia kemudian mendistribusikan sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses rangkaian kegiatan pendidikan sehingga tercapai pembejalaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai mutu layanan madrasah

⁵³ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm 175

⁵⁴ Nurhayati, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*, No.2, Vol.3, Tahun 2022, hlm.598-599

yang baik, biaya pendidikan juga harus dikelola dengan optimal. Karena penggunaan dana yang efektif akan memberikan layanan yang baik pula dan akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan.